

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 46 Kota Pekalongan Kode Pos 51114 Telepon: (0285) 423993 Faksimile 423993 *e-mail*
dkpkotapekalongan@gmail.com *Website* dkpkotapekalongan.go.id



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
	2.2 Sumber Daya PD
	2.3 Kinerja Pelayanan PD
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KD
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota
	3.4 Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	3.1 Tujuan
	3.2 Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini diarahkan untuk mencapai Misi ke 5 yakni “Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal” dengan tujuan menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan dalam periode Tahun 2021 – 2026 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15



- Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 No3);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai acuan resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2021-2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;

5. Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi ;
6. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur ;

1.4 Sistematika Penulisan

Revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan untuk tahun 2017 - 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota 83 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya serta 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

2.1.1 Tugas

- 1) DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), DKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran program urusan bidang kelautan dan perikanan ;
- b. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur pendukung di bidang kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

- c. Pembinaan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan ;
- d. Penetapan program penyuluh perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- e. Penyelenggaraan penataan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan ;
- f. Pembinaan produksi di bidang kelautan dan perikanan dan pengawasan mutu serta peredaran benih / bibit ikan ;
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan pelelangan ikan;
- h. Pengendalian dan pemberdayaan nelayan kecil ;
- i. Penetapan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan dan penerbitan surat pencatatan usaha penangkapan ikan dan pembinaan pembudidayaan ikan sesuai perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Pengkoordinasian fasilitasi riset dan pemagangan di bidang kelautan dan perikanan ;
- k. Pengarahan dan pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) ;
- l. Pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

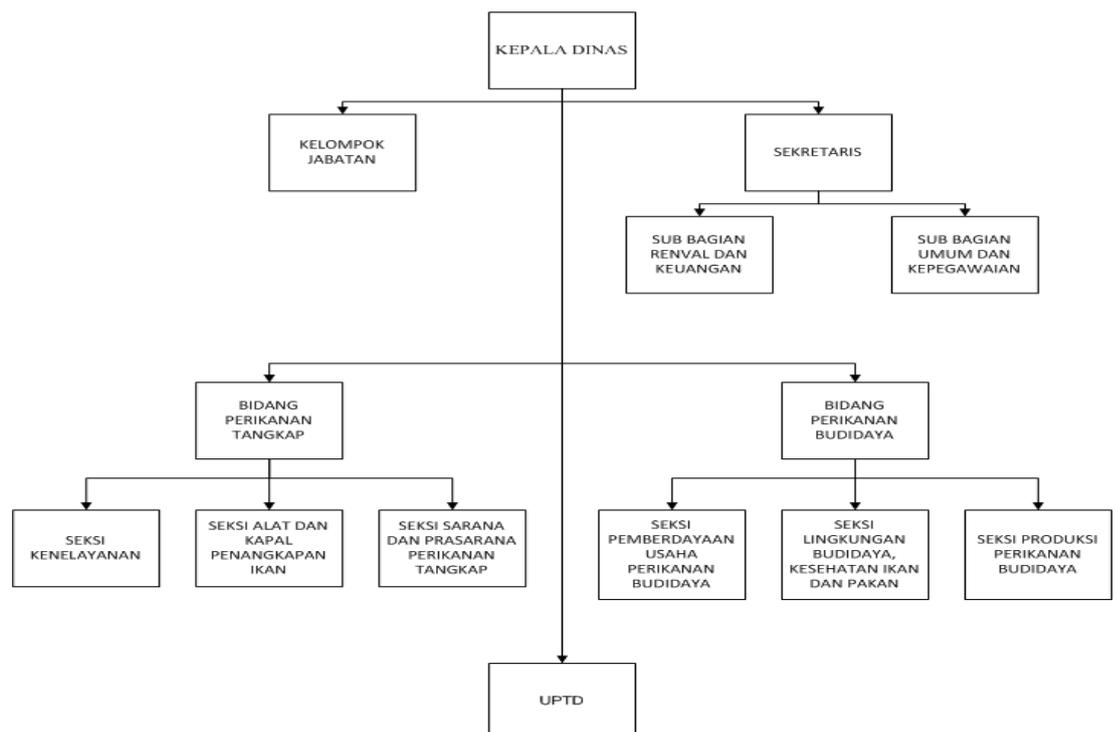
2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota 83 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. ditetapkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan terdiri dari :

Susunan Organisasi DKP, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap
 1. Seksi Kenelayanan;
 2. Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pesisir.
- d. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pakan; dan
 3. Seksi Produksi Budidaya Ikan.
- e. UPTD.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1. Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.2.1 Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah PNS SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Golongan I	0	0	0	0
2	Golongan II	8	8	27,59	27,59
3	Golongan III	15	15	51,72	44,83
4	Golongan IV	6	8	20,69	27,58
	Jumlah	29	29	100,00	100,00

Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah PNS SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	SD	0	0	0,00	0,00
2	SLTP	3	3	10,34	10,34
3	SLTA	8	8	27,59	27,59
4	DIPLOMA I	0	0	0,00	0,00
5	DIPLOMA II	0	0	0,00	0,00
6	DIPLOMA III	2	2	6,90	6,90
7	DIPLOMA IV	0	0	0,00	0,00
8	S-1	13	13	44,83	41,38
9	S-2	3	3	10,34	13,79
10	S-3	0	0	0,00	0,00
	Jumlah	29	29	100,00	100,00

Tabel 2.4 Rekapitulasi Pejabat Struktural SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2019	2020	2019	2020
1	II.A	0	0	6,67	6,67
2	II.B	1	1	0,00	0,00
3	III.A	1	1	6,67	6,67
4	III.B	2	2	13,33	13,33
5	IV.A	9	9	60,00	60,00
6	IV.B	2	2	13,33	13,33
	Jumlah	15	15	100,00	100,00



1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:

1.2.2.1 Sarana tidak bergerak berupa

Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1	Tanah	4
2	Gedung dan bangunan	40
3	Jalan Irigasi dan jaringan	42

1.2.2.2 Sarana bergerak berupa :

Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	Tanah	4
2	Alat Besar	2
3	Pompa Air	2
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Stasion Wagon)	4
5	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pick Up)	3
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1
7	Sepeda Motor	24
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1
9	Kendaraan tak Bermotor Angkut Barang (Gerobak Tarik)	53
10	Kendaraan tak Bermotor Angkut Barang (Gerobak Dorong)	64
11	Battery Charge	1
12	Tool Kit Set	1
13	Scaffolding Set & Tool	3
14	Global Positioning System	2
15	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	2



No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
16	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	7
17	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	7
18	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	5
19	Timbangan Biasa	21
20	Alat Timbangan Lain-lain	5
21	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
22	Lemari Penyimpan	4
23	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1
24	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	7
25	Alat Produksi Perikanan	4
26	Alat-alat Peternakan Lain-lain	23
27	Mesin Ketik Manual	5
28	Mesin Hitung Listrik	8
29	Mesin Kas Register	10
30	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	4
31	Lemari Besi/Metal	6
32	Lemari Kayu	18
33	Rak Besi	2
34	Rak Kayu	2
35	Filing Cabinet Besi	8
36	Kardex Besi	1
37	Lemari Kaca	2
38	Papan Visual/Papan Nama	2
39	White Board	1
40	Mesin Absensi	4
41	Overhead Projector	1
42	Papan Nama Instansi	7
43	Papan Pengumuman	5
44	Papan Tulis	1
45	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	5
46	Meja Kerja Besi/Metal	4
47	Meja Kerja Kayu	27



No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
48	Kursi Besi/Metal	18
49	Kursi Kayu	22
50	Meja Rapat	7
51	Meja Resepsionis	1
52	Meja Tambahan	4
53	Meja Panjang	9
54	Kasur/Spring Bed	60
55	Kursi Rapat	238
56	Kursi Tamu	12
57	Kursi Putar	2
58	Kursi Lipat	10
59	Meja Komputer	5
60	Sofa	5
61	Meja Biro	2
62	Meja Tulis	19
63	Mesin Pemotong Rumput	6
64	Lemari Es	6
65	A.C. Window	22
66	A.C. Split	6
67	Kipas Angin	9
68	Exhause Fan	2
69	Reach In Frezzer	2
70	Kompore Gas (Alat Dapur)	1
71	Tabung Gas	1
72	Alat Dapur Lainnya	4
73	Televisi	6
74	Loudspeaker	16
75	Sound System	6
76	Wireless	5
77	Microphone	1
78	Camera Video	18
79	Tiang Bendera	2



No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
80	Tangga Aluminium	4
81	Dispenser	16
82	Mimbar/Podium	1
83	Handy Cam	4
84	Gordyin/Kray	20
85	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
86	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3
87	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
88	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	27
89	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1
90	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1
91	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
92	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7
94	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	19
95	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	8
96	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	6
97	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12
98	Compact Disc Player	2
99	Talk Back Unit	10
100	Microphone/Wireless MIC	12
101	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6
102	Power Amplifier	5
103	Proyektor + Attachment	7
104	Peralatan studio Visual Lain-lain	3
105	Off Air TV Monitor	1
106	Camera Electronic	13
107	Camera Film	1
108	Alat Kkomunikasi Telephon	5
109	Antene SHF Stationary	1
110	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	7
111	D.O. Meter	1



No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
112	Alat Laboratorium Hidro Kimia Lain-Lain	3
113	Unconfinet Soil Test	1
114	Microscope	1
115	PH Meter	1
116	Alat Pembuat Pelet	1
117	Alat Laboratorium Kimia Lain-lain	1
118	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	19
119	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	64
120	Pompa Airasil	6
121	Refractometer	2
122	Tester Kit	3
123	Thermometer 0.0 - 100.0 C	1
124	Soil PH Meter	3
125	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air	2
126	Refractometer	3
127	PH Meter	3
128	KOMPUTER JARINGAN Lain-lain	1
129	P.C Unit	20
130	Lap Top	27
131	Note Book	14
132	Hard Disk	9
133	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
134	Monitor	1
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50
136	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6
137	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	8
138	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	3
139	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	11
140	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	4
141	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	8
142	Bangunan Tempat Parkir	1
143	Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain	1



No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
144	Monumen	1
145	Tugu Peringatan Lainnya	1
146	Jalan dan Jembatan	7
147	Bangunan Air	16
148	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
149	Jaringan Air Minum	5
150	Jaringan Listrik	8
151	Jaringan Telephon Diatas Tanah	1
152	Bahan Perpustakaan	106
153	Bahan Perpustakaan Tercetak	101
154	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel T-C.23 yakni Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Perikanan dan Kelautan											
1	Nelayan yang dibina	%	600 orang	8,00	8,00	-	11,83	14,64	963,00	888 orang	tercapai
2	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	187 M di Th 2015	2,00	2,00	1,95	13,23	-0,41	176,84	209 M	belum tercapai
3	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Rp. Milyar	4.2 M	2	2	1,95	13,23	-0,41	5,30	5.5 M	akan tercapai
	- Jumlah KUB yang dibina	KUB		30		30	30	30	30	30	tercapai
	- Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI;	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah pelatihan nelayan pada musim paceklik yang dilaksanakan	kali		1		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah laporan statistik yang disusun	dok		1		1	1	1	1	1	tercapai
4	peningkatan konsumsi makan ikan	%	22,3 kg/kpt/tahun	6,00	6,00	-	12,73	8,10	33,64	28 kg/kpt/tahun	tercapai



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	1382 ton	5,00	5,00	0	0,7	-53,97	809,03	1870,00	belum tercapai
6	persentase pembudidaya yang dibina	%	230 orang	30,00	30,00	-	30	29,81	1181,00	644 orang	tercapai
	- Jumlah Pakan Induk yang diadakan	kg		200		725	200	725	725	725	tercapai
	- Jumlah Pakan Benih yang diadakan	kg		80		220	80	220	220	220	tercapai
	- Jumlah Bibit Rumput Laut yang diadakan	kg		0		1.000	0	1.000	1.000	1.000	tercapai
	- Jumlah Pakan Ikan yang diadakan	kg		1080		1.000	1080	1.000	1.000	1.000	tercapai
	- Jumlah lomba pokdakan yang diadakan	kategori		3		3	3	3	3	3	tercapai
7	Peningkatan tenant dan non tenant	persen	6 tenant	50	50	-	57	50,00	30,00	24 tenant	tercapai
	- Jumlah pagar dan saluran drainase technopark yang dibangun	paket		0		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan	Kali		0		3	3	3	3	3	tercapai
	- Jumlah Gedung yang terpelihara di Kawasan Technopark	Kawasa n		0		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah sarpras yang terbangun	pekerjaa n		0		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah DED Tecknopark yang diadakan	pekerjaa n		0		1	1	1	1	1	tercapai
Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan		11		11	11	11	11	11	tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/kali				100		100			
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang / berat	Unit		1		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala	Unit		37		34	37	34	34	34	tercapai
	- Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala dan beroperasi	Unit		1		1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang / berat	Unit/lokasi/gedung		3		1	3	1	1	1	tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit		16		9	16	9	9	9	tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dok		6		6	6	6	6	6	tercapai



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan LaporanLaporan Keuangan SKPD yang disusun	dok		6		6	6	6	6	6	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai

Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap

Nilai produksi perikanan tangkap di TPI Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada kurun waktu 2017 jumlah nilai produksi ikan tangkap sebesar Rp 164.608.434.000,00 pada tahun 2018 menurun menjadi Rp .811.357.000,00. Namun demikian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 177.561.710.000,00 atau terjadi **peningkatan** nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 20,8 Milyar (13.23%) melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%. Nilai produksi Tahun 2020 sebesar 176.838.757.000,- dengan target 1,95 % . Berikut kami sajikan nilai produksi perikanan tangkap di TPI .

Tabel 2.7 Nilai Produksi Perikanan Tangkap di TPI Kota Pekalongan

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2015	14.730.900	188.579.000.000
2016	15.641.111	209.626.606.000
2017	10.474.512	164.608.434.000
2018	10.980.029	156.811.357.000
2019	14.991.858	177.561.710.000
2020	13.887.554	176.838.757.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI

Pada Tahun 2018 realisasi PAD sebesar 4.704.340.710,- dan Tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 5.326.851.300,- mengalami peningkatan sebesar 13,23% melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%. Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp 5.305.162.710.000,- dengan target 1,95 % . Peningkatan pendapatan daerah bersumber TPI dapat dilihat pada 24 table dibawah ini :

Tabel 2.8 Realisasi PAD Bersumber dari TPI

Tahun	PAD
2015	5.621.298.630
2016	6.288.798.180
2017	4.938.253.020
2018	4.704.340.710
2019	5.326.851.300
2020	5.305.162.710

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

Nelayan yang dibina

Jumlah nelayan yang telah mempunyai kartu nelayan : 1.395 orang, yang dibina Tahun 2019 sejumlah 870 nelayan atau 11,83% lebih tinggi dari tahun 2018 sejumlah 778 nelayan. Pembinaan nelayan ini melalui kunjungan perorangan, kelompok, sosialisasi peraturan pemerintah, pelatihan SDM nelayan , bintek, akses permodalan perbankan (Bankebel), alih usaha nelayan pada musim paceklik (budidaya lele, nila, udang, diversifikasi pengolahan ikan bagi keluarga nelayan).

Peningkatan produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 1.745.200 Kg menjadi 1.757.460 Kg atau peningkatan sebesar 0,70%. Meskipun mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut relatif kecil dan dibawah target peningkatan tahun 2019 sebesar 5%. Produksi perikanan budidaya Pada Tahun 2020 sebesar 809.032 kg atau mengalami penurunan dari Tahun 2019, namun nilai produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019 . Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan :

- Banyak lahan tambak yang tidak berfungsi karena tanggul, karena bencana banjir hujan dibulan febuari, banjir rob di mei-juni,okt,nov, des.

Berikut tabel realisasi produksi perikanan budidaya Tahun 2020.

Tabel 2.9 Realisasi produksi perikanan budidaya Tahun 2016 - 2020

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2016	1.502.000	26.213.120.000
2017	1.625.208	22.631.340.000
2018	1.745.200	27.028.518.000
2019	1.757.460	29.404.036.000
2020	809.032	30.781.351.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020



Dari tabel pencapaian kinerja tersebut diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan selama tahun 2016-2020 dipengaruhi keberhasilan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, yaitu :

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Tidak Langsung	-	2.799.273.000	2.903.487.000	2.921.271.000	3.523.260.000	-	2.692.372.254	2.517.908.199	2.438.698.003	3.287.678.758	-	96	87	83	93	2.885.493.527	2.535.584.402
2	Belanja Langsung	-	7.468.706.000	4.441.500.000	5.356.774.000	4.407.663.000	-	7.059.968.152	4.212.500.018	5.208.125.759	4.131.276.227	-	95	95	97	94	5.285.814.145	4.352.225.895

Semua program dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target, ada 2 faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100%, yaitu:

1. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa;
2. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan.

Kedua hal tersebut merupakan hal yang bersifat non teknis, sehingga tidak mengganggu kinerja program dan kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

Tantangan pengembangan pelayanan yang akan datang antara sebagai berikut :

a) Perikanan Budidaya

- berkurangnya lahan karena terinterusi air laut.
- faktor cuaca yaitu kemarau yang panjang Bulan Juli – Desember.
- Minimnya pasokan air tawar di kawasan budidaya ikan
- Sungai yang tercemar air limbah sehingga sumber air susah untuk sarana budidaya
- Banyak pembudidaya yang beralih profesi.
- Banjir Bulan Januari .

b) Perikanan Tangkap

- Bantuan program asuransi nelayan hanya diberikan kepada nelayan berukuran dibawah 10 GT sedangkan untuk kapal diatas 10 GT belum adanya program asuransi nelayan.
- Daya serap ikan hasil pelelangan masih terbatas yaitu sekitar 40 ton perhari disebabkan karena bakol-bakol tidak mampu mencari pangsa pasar.
- Terbatasnya kapal-kapal pengangkut produksi ikan di laut yang memiliki pangkapal di pelabuhan Pekalongan.
- Adanya musim Baratan dan Timuran yang menyebabkan nelayan tidak bisa berangkat melaut untuk mencari ikan.

Solusi

a) Perikanan Budidaya

Solusi yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya antara lain :

- Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan perbaikan infrastruktur;
- Pendampingan pemberdayaan kelompok perikanan;
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait ;



b) Perikanan Tangkap

- Asuransi nelayan diatas 10 GT diusahakan oleh pemilik kapal/ pengusaha kapal atas fasilitasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait.
- Melakukan lelang sample dan mendatangkan bakol-bakol dari luar Kota.
- Melakukan pendekatan pengusaha untuk membuat kapal pengangkut yang berpangkalan di Kota Pekalongan.
- Melakukan pembinaan/ pelatihan pada saat musim paceklik untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepada nelayan ataupun keluarganya.

Peluang

a) Perikanan Budidaya

- Banyak pembudidaya yang beralih membudidayakan ikan hias ;
- Masih tersedianya lahan untuk pembenihan ikan nila dan lele ;
- Tersedianya lahan untuk tambak udang dan jaringan listrik ;
- Ada sejumlah pembudidaya yang memanfaatkan lahannya untuk komoditas ikan yang tahan dengan air payau.
- Kawasan Technopark Perikanan.
- Tersedianya asuransi budidaya (bantuan & mandiri).

b) Perikanan Tangkap

- Adanya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan sebagai dasar pembinaan nelayan.
- Terdapatnya sarpras perikanan tangkap meliputi coldstorage, galangan dan dogging kapal, pabrik es, serta SPBU/ SPBN Nelayan.
- Adanya Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara.
- Keterbukaan untuk melakukan usaha sampingan nelayan dan keluarganya.
- Adanya pelelangan ikan yang berasal dari mobil berpendingin.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS

Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan perangkat daerah terhadap bidang urusan perangkat daerah (urusan pilihan kelautan dan perikanan) secara terpisah atau sekaligus . Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab perangkat daerah.

Isu strategis perangkat daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu perangkat daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah perangkat daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi perangkat daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berikut kami sampaikan permasalahan dan isu – isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang diuraikan pada bagian :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isuisu penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Pekalongan, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun

2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan disajikan pada Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.

Tabel T-35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Kecenderungan produksi perikanan yang rendah atau menurun	Masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di TPI Pekalongan;	Daya serap ikan hasil pelelangan masih terbatas yaitu sekitar 40 ton perhari disebabkan karena bakol-bakol tidak mampu mencari pangsa pasar
		Terbatasnya kapal-kapal pengangkut produksi ikan di laut yang memiliki pangkalan di pelabuhan Pekalongan
		Adanya musim Baratan dan Timuran yang menyebabkan nelayan tidak bisa berangkat melaut untuk mencari ikan.
	Masih rendahnya produksi dan produktivitas lahan perikanan budidaya;	berkurangnya lahan karena terinterusi air laut.
		Minimnya pasokan air tawar di kawasan budidaya ikan
		Sungai yang tercemar air limbah sehingga sumber air susah untuk sarana budidaya
		Banyak pembudidaya yang beralih profesi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah : ***“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan ;
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government;

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang dalam misi ke 5 yaitu ***“Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal”***, untuk mendukung misi tersebut, maka yang menjadi Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota.

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi dari Kementrian Kelautan Perikanan adalah “Mewujudkan sector kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Mandiri dimaksud kedepan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil 30 perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni:
 - a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 - b. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
 - b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
 - c. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

3. Kesejahteraan/ Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
 - a. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis kota, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029), Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Pekalongan yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Pusat Kegiatan wilayah ini adalah Kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, sehingga sarana prasarana dan fasilitas kota yang ada harus dapat melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029).

Selain Pusat Kegiatan Wilayah, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Sistem Perwilayahan dilakukan dengan pembagian Wilayah Pengembangan dan penentuan arah pengembangan. Kota Pekalongan masuk dalam Wilayah Pengembangan Petanglong yang berpusat di Kawasan Perkotaan Pekalongan, dengan arah pengembangan meliputi : memadukan pembangunan Kota Pekalongan dan Wilayah sekitarnya, dan pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan (industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan).

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana.

Pusat Pelayanan Kota / PPK yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional berada di kelurahan Kauman dan Bendan Kergon. Sedangkan Sub Pusat Pelayanan Kota / SPPK tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di :

- 1) SPPK Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Tirto;
- 2) SPPK Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan;

3) SPPK Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer dan Kalibaros; dan

4) SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip.

Pelayanan Lingkungan / PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di :

1) PL di Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pringrejo;

2) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Kandang Panjang;

3) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu;

4) PL di Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer;

5) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan

6) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Sokoduwet.

Selanjutnya untuk pedoman penataan ruang yang mendukung pelaksanaan RTRW telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab serta KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1) Kawasan Tirto, Koridor Batas Barat s.d. Jl Gajah Mada,

2) Kawasan Koridor Jl. Hayam Wuruk-Jl. Dr. Cipto dan Alun-alun,

3) Kawasan Koridor Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Gatot Subroto dan Jl. Pelita II,

4) Kawasan Koridor Jl. W.R. Supratman-Jl. Pantai Sari-Jl. Samudra, Kawasan Teknopark Perikanan,

5) Kawasan Terpadu Kuripan dan Koridor Jl. H.O.S. Cokroaminoto, dan

6) Kawasan Batas Kota sebelah Timur dan Koridor Jl. Dr. Sutomo.

3.4.2 *Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi substansi terpenting KLHS meliputi:

- a. Status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup, secara umum menggambarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan daya tampung menggambarkan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan maupun seluruh kehidupan.
- b. Skenario TPB tanpa upaya tambahan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) tanpa memerlukan upaya tambahan atau Business As Usual (BAU). Dengan melaksanakan pembangunan yang sudah kita laksanakan selama ini maka target TPB akan tercapai pada tahun 2024.
- c. Skenario TPB dengan upaya tambahan. Skenario TPB dengan upaya tambahan adalah skenario terhadap pencapaian target TPB yang tidak akan tercapai pada tahun 2024 (masa berakhirnya RPJMD) dengan Business As Usual (BAU), sehingga memerlukan upaya tambahan untuk pencapaian target tersebut.
- d. Penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kota Pekalongan mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya

tambahan. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2024 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain, terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang Rekomendasi program.

- e. Rekomendasi program dari KLHS untuk masukan penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 berupa usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD.

Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pekalongan telah terlampaui, namun masih terdapat kapasitas daya dukung dan daya tampung aspek tertentu dan kecamatan tertentu yang dapat dioptimalkan. Para pemangku kepentingan harus “secara bijaksana” menjadikan status lingkungan hidup Kota Pekalongan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan maupun pencapaian target TPB. Pertimbangan terhadap status lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan. Sesuai dengan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terhadap kelima aspek penting yang telah disebutkan di atas maka akan diuraikan dua hal aspek yang terpenting yaitu status lingkungan hidup serta penentuan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah, karena kedua aspek harus dicermati dan dijadikan masukan penting bagi RPJMD Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

- Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
- Penentuan Isu Strategis, Permasalahan dan Sasaran Strategis Daerah.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu identifikasi faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi /kabupaten /kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa **isu strategis** yang menjadi landasan bagi penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 yakni:

Perikanan Budidaya

- 1) Banjir hujan di awal tahun dan banjir rob pertengahan tahun;
- 2) Adanya potensi perikanan budidaya, konservasi mangrove dan pariwisata bahari diutara tanggul Kelurahan Kandang Panjang kurang termanfaatkan lebih optimal;
- 3) Masih kurang berkembangnya usaha budidaya ikan hias (cupang dan Guppy);
- 4) Masih banyaknya budidaya perikanan air payau (tambak) secara tradisional;
- 5) Perubahan ekosistem (dari air payau menjadi air tawar);
- 6) Kurang tertatanya Waduk (sodetan) di daerah Krapyak untuk kegiatan budidaya perikanan;



Perikanan Tangkap

- 1) Pembangunan bendung gerak yang berdampak pada :
 - Pentingnya docking kapal sehingga mengurangi minat kapal untuk lelang di TPI;
 - Pembuatan parapet tinggi hamper 2 m dapat menyebabkan penambahan biaya dan waktu bongkar.
- 2) Banjir rob di TPI semakin tinggi terutama di parkiran yang berdampak pada turunya minat penjualan ikan dari truk freezer yang lelang di TPI;
- 3) Bantuan program asuransi nelayan hanya diberikan kepada nelayan berukuran dibawah 10 GT sedangkan untuk kapal diatas 10 GT belum adanya program asuransi nelayan.
- 4) Kemampuan bakul masih kecil sekitar 40 ton perhari sehingga apabila jumlah yang dilelang melebihi 40 ton harga ikan cenderung turun.
- 5) Masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di TPI Kota Pekalongan;
- 6) Tinggi sedimentasi alur muara pelabuhan Kota Pekalongan yang menyebabkan pendangkalan sehingga mempengaruhi kapal keluar masuk pelabuhan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dengan target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang (2016 – 2021) ,yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik;
 - Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan produksi perikanan;
 - Indikator kinerja Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya).

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - Indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.
2. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya).
 - Indikator kinerja Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota.



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan beserta indikator serta target kinerja dari Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam Tabel T.C.25



Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -						
					TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	TH. 2024	TH. 2025	TH. 2026	KONDISI AKHIR
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
<u>TUJUAN I</u>											
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	78.19	78.44	78.69	78.94	79.19	79.44	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	78.46	80.00	81.50	83.00	84.50	86.00	87.50	87.50
<u>TUJUAN II</u>											
Meningkatkan produksi perikanan		Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Persen			1	1	1	1	1	5,1
	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	14.696	14.843	14.991	15.141	15.293	15.446	15.600	15.600

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Program unggulan yang mendukung misi ini adalah peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kompetensi dan kinerja, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan dijelaskan dalam Tabel T-C.26 berikut.

VISI	"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"		
MISI I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada .
			Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
			Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program.
			Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya .
			Penataan pondasi keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan.
			Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha .



			<p>Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan .</p> <p>Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan .</p> <p>Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha</p>
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan			
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan akses pendidikan serta penyelenggaraan pendidikan karakter dan keagamaan.	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukan anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga.
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan		<p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas .</p> <p>Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan .</p> <p>Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non, formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan .</p> <p>Optimalisasi pencapaian akses dan kualitas pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan serta tatanan kehidupan yang religius .</p>



	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja	<p>Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.</p> <p>Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.</p> <p>Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.</p> <p>Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.</p> <p>Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerja.</p>
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait .	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan dan Responsif Anak Penganggaran yang Responsif Gender
	Pengarusutamaan Hak Anak		<p>Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)</p> <p>Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak</p> <p>Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus</p> <p>Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi</p>
Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman			
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh



		dan peningkatan kualitas jalan lingkungan	<p>Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p> <p>Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p> <p>Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p> <p>Fasilitasi pengelolaan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani</p>
Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan			
Optimalnya penanganan banjir dan rob Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun.
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Menurunkan tingkat pencemaran air	Menurunnya tingkat pencemaran air		Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
	Optimalnya kualitas lahan		Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang		<p>Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Peningkatan peran serta swasta/masyarakat untuk penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.</p>
Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar	Optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun.
	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan		Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.



	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan		<p>Peningkatan peran serta stake holder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.</p> <p>Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Penguatan pengelolaan/kelembagaan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.</p>
Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal			
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	<p>Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal</p> <p>Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing</p> <p>Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif</p> <p>Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>Penguatan pondasi keberlanjutan ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa</p>
Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah			
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya



Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
			Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
			Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya loka
			Penguatan pondasi pelestarian, pemberdayaan, pengembangan, pendiskripsian dan pendokumentasian seni tradisi lokal
		Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigas	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota.
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)		Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN		Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan		Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment.
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan		Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi daerah, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan melibatkan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga. Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2017-2021, dan sebagai arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka berikut ini disusunlah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam tabel 6.1 sebagaimana berikut.



Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target / Pagu												
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.106.250.000		3.573.950.000		3.961.350.000		3.957.050.000		3.918.950.000		3.970.300.000	
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)			2.892.450.000		2.682.750.000		2.913.450.000		2.945.050.000		2.879.650.000		2.913.400.000	
			Indikator Program : Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI			1 persen	94.450.000	1 persen	201.850.000	1 persen	403.150.000	1 persen	404.450.000	1 persen	307.850.000	1 persen	309.400.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				62.200.000		77.800.000		278.450.000		279.100.000		179.800.000		180.550.000	
			Indikator Kegiatan : Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			5 persen	62.200.000	5 persen	77.800.000	5 persen	278.450.000	5 persen	279.100.000	5 persen	179.800.000	5 persen	180.550.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				27.000.000		27.800.000		28.450.000		29.100.000		29.800.000		30.550.000	



			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang tersedia		1 dokumen	27.000.000	1 dokumen	27.800.000	1 dokumen	28.450.000	1 dokumen	29.100.000	1 dokumen	29.800.000	30.500.000	1 dokumen
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				35.200.000	0	0		200.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang tersedia		1 Unit	35.200.000	0 Unit	0	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	100.000.000	1 Unit
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia		0 Unit	0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	50.000.000	1 Unit
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				32.250.000		91.050.000		91.700.000		92.350.000		95.050.000		95.850.000
			Indikator Kegiatan : Persentase Nelayan Kecil yang dibina		10 persen	32.250.000	10 persen	91.050.000	10 persen	91.700.000	10 persen	92.350.000	10 persen	95.050.000	10 persen	95.850.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				32.250.000		33.050.000		33.700.000		34.350.000		35.050.000		35.850.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan		33 KUB	32.250.000	33 KUB	33.050.000	33 KUB	33.700.000	33 KUB	34.350.000	33 KUB	35.050.000	35.800.000	33 KUB



Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			0		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kelompok nelayan yang dibina		0 Kelompok	4 Kelompok	45.000.000	4 Kelompok	45.000.000	4 Kelompok	45.000.000	4 Kelompok	45.000.000	45.000.000	4 Kelompok
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			0		13.000.000		13.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan		0 Nelayan	5 Nelayan	13.000.000	5 Nelayan	13.000.000	5 Nelayan	13.000.000	5 Nelayan	15.000.000	15.000.000	5 Nelayan
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000
			Indikator Kegiatan : Persentase jumlah permohonan kapal yang daftarkan		40 persen	41.67 persen	23.000.000	43.33 persen	23.000.000	45 persen	23.000.000	46.67 persen	23.000.000	48.33 persen	23.000.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			0		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000



			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pencatatan kapal		0 dokumen	0	20 dokumen	12.000.000	12.000.000	20 dokumen						
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				0	11.000.000	11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendataan kapal		0 kapal	0	10 kapal	11.000.000	11.000.000	10 kapal						
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0	0	0		0		0		0		0
			Indikator Kegiatan : Jumlah izin kapal penangkap yang diusahakan		0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	0	100 persen	0
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT				0	0	0		0		0		0		0
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	10.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000



			Indikator Kegiatan : Persentase Pendaftaran Kapal yang Beroperasi	47.5 persen	0	52.5 persen	10.000.000	57.5 persen	10.000.000	62.5 persen	10.000.000	67.5 persen	10.000.000	72.5 persen	10.000.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani	0 kapal	0	70 kapal	10.000.000	10.000.000	70 kapal						
			Indikator Program :Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	2.798.000.000	1 persen	2.480.900.000	1 persen	2.510.300.000	1 persen	2.540.600.000	1 persen	2.571.800.000	1 persen	2.604.000.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			2.798.000.000		2.480.900.000		2.510.300.000		2.540.600.000		2.571.800.000		2.604.000.000
			Indikator Kegiatan : Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1 Persen	2.798.000.000	1 Persen	2.480.900.000	1 Persen	2.510.300.000	1 Persen	2.540.600.000	1 Persen	2.571.800.000	1 Persen	2.604.000.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			2.798.000.000		2.480.900.000		2.510.300.000		2.540.600.000		2.571.800.000		2.604.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI	12 Bulan	2.798.000.000	12 Bulan	2.480.900.000	12 Bulan	2.510.300.000	12 Bulan	2.540.600.000	12 Bulan	2.571.800.000	12 Bulan	2.604.000.000



Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				507.000.000		491.200.000		632.200.000		590.500.000		601.700.000		613.100.000
			Indikator Program :Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		1 persen	507.000.000	1 persen	491.200.000	1 persen	632.200.000	1 persen	590.500.000	1 persen	601.700.000	1 persen	613.100.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		11.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000
			Indikator Kegiatan : Persentase Usulan Permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Budidaya yang Diterbitkan		100 persen	0	100 persen	11.000.000	100 persen	24.000.000						
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				0		0		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000



			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Int yang diterbitkan		0 Pembudidaya	0	0 Pembudidaya	0	100 Pembudidaya	13.000.000	100 Pembudidaya	13.000.000	100 Pembudidaya	13.000.000	13.000.000	100 Pembudidaya
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				0	11.000.000	11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000



			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, sert yang diterbitkan		0 Pembudidaya	0	100 Pembudidaya	11.000.000	100 Pembudidaya	11.000.000	100 Pembudidaya	11.000.000	11.000.000	100 Pembudidaya		
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pemberdayan Pembudi Daya Ikan Kecil				322.000.000		143.000.000		170.000.000		177.000.000		185.000.000	195.000.000	
			Indikator Kegiatan : Persentase Pembudidaya yang dibina		38.66 persen	322.000.000	50.29 persen	143.000.000	61.92 persen	170.000.000	67.73 persen	177.000.000	73.55 persen	185.000.000	79.36 persen	195.000.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				281.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	100.000.000	
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah benih ikan yang diadakan		700 Ekor	281.000.000	750 Ekor	100.000.000	750 Ekor	100.000.000	750 Ekor	100.000.000	750 Ekor	100.000.000	100.000.000	750 Ekor



Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil				41.000.000		43.000.000		45.000.000		47.000.000		50.000.000		55.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklhas yang dilaksanakan	4 kategori	41.000.000	4 kategori	43.000.000	4 kategori	45.000.000	4 kategori	47.000.000	4 kategori	50.000.000	55.000.000	4 kategori	
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Bantuan Pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha yang difasilitasi	0 Pembudidaya	0	0 Pembudidaya	0	40 Pembudidaya	10.000.000	40 Pembudidaya	10.000.000	40 Pembudidaya	10.000.000	10.000.000	40 Pembudidaya	
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pembinaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				0		0		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembudidaya yang dilatih	0 Pembudidaya	0	0 Pembudidaya	0	80 Pembudidaya	15.000.000	80 Pembudidaya	20.000.000	80 Pembudidaya	25.000.000	30.000.000	80 Pembudidaya	



Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	140 dokumen	20.000.000								
			Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen TDPIK yang diterbitkan		0	140 dokumen	20.000.000								
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	140 dokumen	10.000.000	10.000.000	140 dokumen						
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah syarat dan prosedur TDPIK yang ditetapkan		0	140 dokumen	10.000.000	10.000.000	140 dokumen						
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	140 dokumen	10.000.000	10.000.000	140 dokumen						
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilayani		0	140 dokumen	10.000.000	10.000.000	140 dokumen						



Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				185.000.000		317.200.000		418.200.000		369.500.000		372.700.000		374.100.000
			Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan		100 persen	185.000.000	100 persen	317.200.000	100 persen	418.200.000	100 persen	369.500.000	100 persen	372.700.000	100 persen	374.100.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen data bidang budidaya		0 dokumen	0	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	1 dokumen						
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		100.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Tambak Dinas/BBI yang dibangun		0 Unit	0	2 Unit	100.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	150.000.000	2 Unit
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000



			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan	0 Unit	0	1 Unit	50.000.000	50.000.000	1 Unit						
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/ Cara Pembenihan Ikan Baik(CPIB) yang diselenggarakan	3 kali	23.000.000	3 kali	25.000.000	25.000.000	3 kali						
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pembiayaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			162.000.000		129.200.000		130.200.000		131.500.000		132.700.000		134.100.000
			ndikator Sub Kegiatan : Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)	1 BBI	162.000.000	1 BBI	129.200.000	1 BBI	130.200.000	1 BBI	131.500.000	1 BBI	132.700.000	134.100.000	1 BBI
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Perencanaan, Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			0		0								
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			706.800.000		400.000.000		415.700.000		421.500.000		437.600.000		443.800.000



			Indikator Program :Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,2 persen	0	12,2 persen	70.000.000	12,2 persen	70.000.000	12,2 persen	70.000.000	12,2 persen	70.000.000	12,2 persen	70.000.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Bagi Usaha Skala Mikro dan kecil	50 persen	0	66.67 persen	20.000.000	83.33 persen	20.000.000	100 persen	20.000.000	100 persen	20.000.000	100 persen	20.000.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penyediaan Data dan Informasi Pemasaran dan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Usaha Pemasaran & Pengolah Perikanan	0 dokumen	0	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	1 dokumen
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000



			Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitas Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		0 persen	0	16.67 persen	50.000.000								
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah terbinaanya pengusaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		0 Orang	0	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	60 Orang	50.000.000	50.000.000	60 Orang
			Indikator Program : Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)		2 pelaku usaha	706.800.000	2 pelaku usaha	330.000.000	2 pelaku usaha	345.700.000	2 pelaku usaha	351.500.000	2 pelaku usaha	367.600.000	2 pelaku usaha	373.800.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				706.800.000		330.000.000		345.700.000		351.500.000		367.600.000		373.800.000



			Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 persen	706.800.000	70 persen	330.000.000	70 persen	345.700.000	70 persen	351.500.000	70 persen	367.600.000	70 persen	373.800.000
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Pembelian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			706.800.000		330.000.000		345.700.000		351.500.000		367.600.000		373.800.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitasi pelaku usaha perikanan yang diberikan	1 kawasan	706.800.000	1 kawasan	240.000.000	1 kawasan	245.700.000	1 kawasan	251.500.000	1 kawasan	257.600.000	263.800.000	1 kawasan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah event lomba kreasi olahan ikan (SIDA)	0 kali	0	1 kali	45.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	55.000.000	1 kali
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan	0 kali	0	1 kali	45.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	55.000.000	1 kali
		Non Urusan			5.382.335.000		5.585.209.000		5.780.780.000		6.014.902.000		6.283.393.000		6.180.071.000



Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat		5.382.335.000		5.585.209.000		5.780.780.000		6.014.902.000		6.283.393.000		6.180.071.000
			Indikator Program : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	4.213.652.000	100 persen	4.414.885.000	100 persen	4.631.430.000	100 persen	4.858.802.000	100 persen	5.105.543.000	100 persen	5.348.221.000
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		30.500.000		22.500.000
			Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	1.438.250.000	100 persen	1.190.250.000	100 persen	1.190.250.000	100 persen	1.190.250.000	100 persen	1.438.250.000	100 persen	1.190.250.000
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		10.750.000		2.750.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	2 dokumen	2.750.000	2.750.000	2.750.000								
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	8.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	8.000.000	0	0 dokumen



Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2 dokumen								
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.250.000		18.250.000		18.250.000		18.250.000		18.250.000		18.250.000	
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	2.750.000	2.750.000	2.750.000	4 dokumen								
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2 dokumen								
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12 bulan								



			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun		5 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	5 dokumen								
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.183.152.000		4.392.385.000		4.608.930.000		4.836.302.000		5.075.043.000		5.325.721.000	
			Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	127.206.060.000	100 persen	133.573.050.000	100 persen	140.069.400.000	100 persen	146.890.560.000	100 persen	154.052.790.000	100 persen	161.573.130.000	
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.124.652.000		4.330.885.000		4.547.430.000		4.774.802.000		5.013.543.000		5.264.221.000	
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	4.124.652.000	12 bulan	4.330.885.000	12 bulan	4.547.430.000	12 bulan	4.774.802.000	12 bulan	5.013.543.000	5.264.221.000	5.264.221.000	12 bulan
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				57.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		12 bulan	57.000.000	12 bulan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	12 bulan						



Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
			Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	579.609.000	100 persen	581.250.000	100 persen	547.850.000	100 persen	554.600.000	100 persen	566.350.000	100 persen	573.350.000
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000
			Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	285.000.000										
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Haktekas dan Kamaval batik	2 kali	9.500.000	9.500.000	9.500.000								



Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				264.109.000		231.250.000		235.250.000		239.250.000		243.250.000		247.250.000
			Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	11.669.963.000	100 persen	9.979.000.000	100 persen	10.129.000.000	100 persen	10.279.000.000	100 persen	10.429.000.000	100 persen	10.579.000.000
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	7.500.000	12 bulan
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.000.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		12 bulan	21.500.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	4.000.000	12 bulan
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		7 unit	37.500.000	7 unit	37.500.000	7 unit	37.500.000	7 unit	37.500.000	7 unit	37.500.000	37.500.000	7 unit
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000



			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	0 bulan	0	12 bulan	10.000.000	10.000.000	12 bulan						
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			130.000.000		103.000.000		106.000.000		109.000.000		112.000.000		115.000.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat dan koordinasi luar daerah	100 kali	130.000.000	100 kali	103.000.000	100 kali	106.000.000	100 kali	109.000.000	100 kali	112.000.000	115.000.000	100 kali
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0		0		0		0		0		0
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.000.000		340.500.000		303.100.000		305.850.000		313.600.000		316.600.000
			Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	17.332.800.000	100 persen	19.309.800.000	100 persen	17.175.400.000	100 persen	17.329.400.000	100 persen	17.768.400.000	100 persen	17.936.400.000
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.800.000	1.800.000	12 bulan								



Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				195.000.000		240.000.000		200.000.000		200.000.000		205.000.000		205.000.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	195.000.000	12 bulan	240.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	205.000.000	205.000.000	12 bulan
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor				109.200.000		98.700.000		101.300.000		104.050.000		106.800.000		109.800.000
			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor		12 bulan	109.200.000	12 bulan	98.700.000	12 bulan	101.300.000	12 bulan	104.050.000	12 bulan	106.800.000	109.800.000	12 bulan
			Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	589.074.000	100 persen	589.074.000	100 persen	601.500.000	100 persen	601.500.000	100 persen	611.500.000	100 persen	258.500.000
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				589.074.000		589.074.000		601.500.000		601.500.000		611.500.000		258.500.000
			Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	31.331.718.000	100 persen	31.331.718.000	100 persen	31.500.000.000	100 persen	32.040.000.000	100 persen	32.610.000.000	100 persen	13.548.000.000



Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				97.574.000		97.574.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		120.000.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala		27 Unit	97.574.000	25 Unit	97.574.000	25 Unit	100.000.000	25 Unit	110.000.000	25 Unit	120.000.000	120.000.000	12 Unit
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				16.000.000		16.000.000		26.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala		1 unit	16.000.000	1 unit	16.000.000	1 unit	26.000.000	1 unit	16.000.000	1 unit	16.000.000	16.000.000	1 unit
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				453.000.000		453.000.000		453.000.000		453.000.000		453.000.000		100.000.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		3 unit	453.000.000	100.000.000	3 unit								
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000
			ndikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan		12 bulan	22.500.000	22.500.000	12 bulan								



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DKP Kota Pekalongan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DKP Kota Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel C.28

Tabel C.28 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekalongan.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	209 M	209 M						
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	5.5 M	5.5 M						
3	Nelayan yang dibina	888 orang	888 orang						
4	Peningkatan produksi perikanan budidaya	1870 Ton	1870 Ton						
5	peningkatan konsumsi makan ikan	28 kg/kpt/tahun	28 kg/kpt/tahun						
6	persentase pembudidaya yang dibina	644 orang	644 orang						
7	Peningkatan tenant dan non tenant	24 tenant	24 tenant						
8	Nilai Evaluasi AKIP	80	80						
9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	850	850						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			78.44	78.69	78.94	79.19	79.44	Indeks
2	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)			1%	1%	1%	1%	1%	5,10%
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota			14.991	15.141	15.293	15.446	15.600	15.600 Ton
4	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI			1%	1%	1%	1%	1%	
5	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			1%	1%	1%	1%	1%	
6	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan			12,2%	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan:

1. Rencana Strategis (renstra) dinas merupakan salah satu cara dalam mendukung visi dan misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 ;
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan ;
3. Rencana Strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program , kegiatan dan sub kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2016-2021 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026 maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 30 September 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pekalongan



Ir. AGUS JATI WALUYO

Pembina Utama muda

NIP. 19620105 19860103 1 012

